

VERDICT ANALYSIS OF NUMBER 2/PDT.SUS-PHI/2016/PN.YYK RELATED TO WORK TERMINATION REVIEWED BY REGULATION NUMBER 13 YEAR 2003 ON THE SUBJECT OF EMPLOYMENT

By:

Arsiko Daniwidho Aldebarant¹ dan Ari Hernawan²

ABSTRACT

The objective of this research is to define and analyze the conformity of Verdict Number 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk with The Regulation Number 13 Year 2003 on the subject of Employment. The secondary objective is to recognize and analyze the implementation of principle of justice in Verdict Number 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk.

This research is a descriptive research aiming to acquire the complete description of legal circumstances in particular territory and period; or regarding the existing juridical indication, or particular legal phenomenon taking place in society. The type of this research is normative legal research (doctrinaire) reviewing the implementation of the principles and values in positive legal (legis positivis). The approach applied in this research is the case study concerning inkracht verdict. Secondary data acquired from literature review is necessary. The document study is the collection technique of legal materials that supports and is related to the description of the research.

The research finding presents Verdict Number 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN is not in accordance with Regulation Number 13 Year 2003 on the subject of Employment especially in addressing the regulation of process wages, the pending rights, severance payment, award payment during years of service, and the payment for rights compensation. The severance payment is only granted once provision that should be twice provision. The award payment during years of service is properly applied based on the provisions. The payment for rights compensation that should be granted as the implementation principles of justice in Verdict Number 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN is not completely achieved. The spirit of providing protection to employees based on Regulation Number 13 Year 2003 on the subject of Employment has not completely applied yet in Verdict Number 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk. Verdict Number 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk takes side on the corporation. It has not put sufficient concern on legal interests or the employees.

Keywords: termination of employment relationship, severance pay, process wage, legal security, fairness

¹ Postgraduate Student Majoring Business Law, Faculty of Law UGM.

² Professor of Labour Law, Faculty of Law UGM.

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS-PHI/2016/PN.YYK TERKAIT
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh:

Arsiko Daniwidho Aldebarant³ dan Ari Hernawan⁴

INTISARI

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis diterapkan atau tidaknya asas keadilan dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memperoleh pemaparan atau gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktriner), mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (*legis positivis*). Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap putusan *inkracht*. Penelitian ini membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen. Data hasil penelitian diambil secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya yang mengatur mengenai upah proses, hak-hak yang tertunda, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Uang pesangon hanya dikabulkan 1 × ketentuan, seharusnya 2 × ketentuan. Uang penghargaan masa kerja sudah sesuai ketentuan. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima dikabulkan sebagian. Penerapan asas keadilan dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk tidak sepenuhnya tercapai. Semangat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum tampak sepenuhnya dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk berpihak kepada pengusaha, tidak memperhatikan kepentingan hukum itu sendiri ataupun para pekerja.

Kata kunci: pemutusan hubungan kerja, pesangon, upah proses, kepastian hukum, keadilan

³ Mahasiswa Magister Hukum Bisnis, FH UGM.

⁴ Guru Besar Hukum Perburuhan, FH UGM.